

**Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk
Mewujudkan *Green Accounting*
(Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah)**

Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak *

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.**

* Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Email: aguskurniawan@radenintan.ac.id

** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, Email: ululazmimsi@gmail.com

ABSTRAK

Akuntansi lingkungan (*green accounting*) adalah suatu tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan cara mencegah, mengurangi bahkan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Analisis akuntansi lingkungan (*green accounting*) yang peneliti lakukan pada BUMDES Adijaya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah yang diterapkan oleh BUMDES. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Adijaya sudah menerapkan akuntansi lingkungan yang terdiri dari lima tahapan alokasi biaya pengelolaan limbah yaitu tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Tetapi tahapan penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum sehingga perlu adanya saran untuk pertimbangan masa yang akan datang.

Kata Kunci; Akuntansi, Lingkungan, Green Accounting, bumdes.

PENDAHULUAN

Peningkatan aspek ekonomi melalui unit usaha desa ini secara tidak langsung akan membawa konsekuensi dampak sosial. Pemanfaatan aset untuk disewakan, menjadi obyek wisata, atau pemberdayaan masyarakat untuk membentuk industri-industri rumahan yang dikoordinasikan di tingkat desa akan menimbulkan permasalahan lingkungan. Sebagai contoh dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah adanya permasalahan limbah, polusi dan berkurangnya lahan terbuka hijau. Hal ini menjadi tantangan bagi desa untuk dapat menjalankan fungsi ekonomi tersebut dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Potensi

pembangunan tersebut juga membawa potensi risiko pada timbulnya permasalahan lingkungan. Tidak seperti koperasi, usaha pribadi maupun kelompok usaha yang dibentuk di desa yang bersifat eksklusif dan hanya diperuntukkan untuk pribadi maupun anggota kelompok, Badan Usaha Milik Desa bersifat lebih inklusif karena diperuntukkan untuk seluruh masyarakat di perhatian serius terhadap lingkungan tempat BUMDes itu beroperasi. Lanjut menurut Pratiwi (2013), semakin berkembangnya kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba secara otomatis menimbulkan konsekuensi lingkungan hidup sekitarnya.¹

BUMDes sebagai salah satu organisasi perusahaan, diharapkan mampu menunjukkan tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan melakukan pelaporan yang desa tersebut. Semua masyarakat di desa tersebut berhak untuk bergabung dan menerima manfaat dari adanya BUMDes.. Masyarakat berhak untuk menanamkan modal (investor) sesuai dengan salah satu ciri utama BUMDes yaitu memiliki modal usaha yang bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil). Selain menjadi investor, masyarakat juga berhak menjadi supplier tergantung bidang usaha yang dijalankan BUMDes. Oleh karena sifatnya yang inklusif, BUMDes harus dikelola oleh masyarakat desa yang bersangkutan dan kepengurusannya dilaksanakan secara terpisah dari pemerintah desa. Namun, sifat inklusif BUMDes dapat meluas sesuai dengan kebijakan desa yang bersangkutan.

Menurut Wijanarko (2012), BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (social institution) dan komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial, BUMDes merupakan operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan masyarakat yang bersangkutan (Wikipedia, 2015). Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes merupakan intitusi yang menjalankan aktivitas komersial dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Kehadiran BUMDes

¹ Pratiwi, Mega Wahyu. 2013. Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnnal Mahasiswa Teknologi. 1- 19.

diharapkan mampu memacu perekonomian desa agar lebih bergairah dan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.²

Tentunya keberadaan BUMDes sebagai salah satu badan usaha desa tidak lepas dari segala bentuk operasional yang dilakukan terkait dengan dampak yang ditimbulkan, salah satunya dampak terhadap lingkungan. BUMDes tidak hanya memperhatikan pada manajemen dan laba yang diperoleh saja. Kini perusahaan khususnya BUMDes juga perlu memberikan berhubungan dengan usaha mencegah pencemaran lingkungan, yaitu dengan menerapkan akuntansi lingkungan. *Konsep Green accounting* merupakan kerangka akuntansi yang melibatkan pendekatan pelaporan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu pelaporan terkait dengan sosial, pelaporan terkait dengan lingkungan dan pelaporan terkait dengan keuangan.³ Dengan menerapkan konsep *green accounting* maka diharapkan pelaporan suatu perusahaan dapat lebih bersifat menyeluruh baik aspek keuangan maupun non keuangan.

Menurut Djogo dalam Rossje (2006) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan atau Environmental Accounting merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*environmental cost*) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah.⁴ Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Sedangkan menurut Environmental Accounting Guidelines (2012), akuntansi lingkungan mencakup pengidentifikasian biaya dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan, penyediaan sarana untuk mendukung proses komunikasi agar tercapai pembangunan berkelanjutan, memelihara hubungan, serta meraih efektivitas dari kegiatan tersebut

Penelitian terkait penerapan akuntansi lingkungan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti pada penelitian Haryanto (2003) yang bertujuan

² Wijanarko. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan Pada Usaha Krupuk Sukun Di Desa Tegalwajo, Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.2, Hal: 1-2

³ Kusumaningtyas, 2013, "Green Accounting, Mengapa Dan Bagaimana?", *Proceeding Seminar Nasional*, ISBN: 978-979-636-147-2, Surakarta.

⁴ Djogo, T. 2006. "Akuntansi Lingkungan" www.beritabumi-h-2.com. Rossje. 2006. Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif <http://www.rossje.net/?p=168>.

untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dalam RSUD Muhammadiyah Jogjakarta menunjukkan bahwa RSUD Muhammadiyah Jogjakarta menggunakan model normatif dalam perlakuan biaya lingkungan yaitu dengan menggabungkan rekening biaya-biaya dalam satu pos biaya.⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2014) yang bertujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi lingkungan pada RK Charitas Palembang menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi biaya yang dilakukan oleh RK Charitas Palembang dilakukan dengan pengakuan biaya lingkungan yang dicatat oleh Bagian Sanitasi Lingkungan yang diakui sebagai salah satu aset tetap.⁶ Dalam penelitian kami, sedikit berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas. Kami lebih mengkaji penerapan akuntansi lingkungan pada sektor perusahaan desa. Adapun beberapa alasan yang melandasi dipilihnya BUMDes dalam penelitian ini, yakni : Pertama, BUMDes sebagai perusahaan yang milik desa yang sedang booming dan kegiatan operasionalnya terkait langsung dengan masyarakat dan lingkungan tempat BUMDes itu beroperasi. Dan dalam BUMDes Desa Adijaya operasional utama yaitu Pengelolaan Sampah banyak menimbulkan permasalahan lingkungan sehingga perlu penanganannya dan biaya-biaya terkait penanganan tersebut. Kedua, sistem pelaporan keuangan BUMDes menarik untuk dikaji jika dikaitkan dengan pengklasifikasian biaya-biaya selama operasional, apalagi pada BUMDes Desa Adijaya bergerak dalam pengolahan sampah terpadu, yang barang tentu ada dampak yang ditimbulkan kepada warga sekitar ataupun lingkungan. Ketiga, dikaitkan dengan peraturan BUMDes yaitu Permendagri No.37 Tahun 2007 yang mengharuskan BUMDes untuk transparan dalam pelaporan segala biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional, termasuk biaya lingkungan.

Maka dari itu, penting untuk mengangkat fenomena akuntansi lingkungan yang ada pada laporan keuangan BUMDes. Hal ini menjadi bahan kajian penting untuk ke depannya bagi setiap BUMDes yang ada. Dengan sudah diterapkannya akuntansi lingkungan dalam segala aktivitas operasional yang ada di BUMDes

⁵ Haryanto. 2003. *Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam RSUD Muhammadiyah Jogjakarta*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: UMY

⁶ Susanti. 2014. *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RK Charitas Palembang*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Palembang: Universitas Truna Merdeka

maka secara tidak langsung Green Economy dapat tercipta dan akan berimplikasi pada ketercapaiannya Green Accounting, yang berorientasi pada kepentingan 3 P yakni profit (keuntungan), people (masyarakat sekitar) dan planet (kelestarian lingkungan).

Identifikasi Masalah

Penelitian ini menganalisis penerapan akuntansi lingkungan dengan pendekatan studi kasus pada BUM Desa yang terdapat di Desa Adijaya dalam mewujudkan *green accounting*. Pertimbangan pemilihan pendekatan studi kasus ini adalah untuk melihat sejauh mana konsep akuntansi lingkungan dapat diterapkan di Desa Adijaya. Sedangkan pemilihan obyek penelitian di sini dikarenakan BUMDes bergerak dalam usaha dalam pengelolaan sampah. Selain itu, Desa Adijaya saat ini sedang dalam pengembangan aktivitas pengolahan limbah. Penelitian ini pada awalnya melihat kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi potensi permasalahan tersebut ditinjau dari penerapan konsep akuntansi lingkungan yang merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola kepada masyarakatnya baik dari aspek keuangan dan non keuangan untuk mewujudkan *green accounting*. Selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam penerapannya.

Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan *Green Accounting*?

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan *Green Accounting*.

E. Penelitian Yang Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan, menjadi bahan perbandingan dan rujukan pada penelitian ini disajikan dibawah ini :

1. Suartana (2010) melakukan penelitian mengenai konsep green accounting dalam pendekatan triple bottom line accounting. Berdasarkan pendekatan tersebut, pelaporan entitas tidak hanya dari aspek finansial tetapi juga dari aspek lingkungan dan sosial. Green accounting akan mewujudkan laporan keuangan yang komprehensif dari suatu entitas. Laporan yang komprehensif akan sangat bermanfaat bagi stake holder dalam menilai kinerja suatu entitas. Implementasi green accounting serta pertanggungjawaban sosial suatu organisasi tetap membutuhkan adanya evaluasi dan monitoring yang bersifat periodik dan
2. Haryanto (2013) Penerapan Akuntansi Lingkungan pada RSUD Muhammadiyah Jogjakarta. Hasil penelitian menunjukkan, RSUD Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan model normatif dalam perlakuan biaya lingkungan yaitu dengan menggabungkan rekening biaya-biaya dalam satu pos biaya
3. Musyaroh (2013) melakukan penelitian kuantitatif untuk mencari perbedaan tanggung jawab antara perusahaan dengan skala industri besar dan kecil. Semakin besar skala industri perusahaan, maka semakin besar pula tanggung jawab terhadap penerapan green accounting. Perbedaan tanggung jawab ini berdampak juga terhadap laporan keuangan dan audit yang berbeda pula.
4. Cho dan Patten (2013) melakukan penelitian bahwa pelaporan akuntansi saat ini tidak cukup hanya dari aspek keuangan saja, tetapi aspek-aspek non keuangan juga dapat terefleksikan di laporan keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan aspek-aspek non keuangan bukan lagi menjadi suatu hal yang voluntary, tetapi menjadi hal yang mandatory untuk dilaksanakan oleh setiap entitas.
5. Susanti (2014) Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RK Caritas Palembang. Hasil penelitian menunjukkan, Perlakuan akuntansi lingkungan dilakukan dengan pengakuan biaya lingkungan yang dicatat oleh bagian sanitasi lingkungan yang diakui sebagai salah satu asset tetap.
6. Adnyana, Atmadja, Herawati (2017) dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan pada BUMDes Tajun, Bali melakukan penelitian dengan

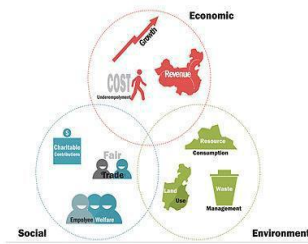
hasil BUMDes Desa Tajun khususnya dalam unit TPST tidak menyajikan biaya lingkungan secara spesifik pada laporan keuangannya. Biaya-biaya lingkungan yang terjadi dimasukkan dalam rekening serumpun dalam laporan aktivitas operasi yaitu dalam biaya operasional. Maka dari itu, BUMDes Desa Tajun dapat dikatakan menerapkan model normatif dalam pengakuan biaya lingkungan dalam penyusunan laporan keuangannya.

Kajian Teoritis Yang Relevan

A. Konsep Akuntansi Lingkungan, Akuntansi Sosial dan *Green Accounting*

Pengertian Akuntansi lingkungan menurut *United States Environment Protection Agency (US-EPA)*, “*Green Accounting is identifying and measuring the cost of environmental materials and activities and using this information for environmental management decisions. The purpose is to recognize and seek to mitigate the negative environmental effects of activities and systems*” (Memorandum USEPA, 1995: 20). Dipaparkan pula US-EPA Dijelaskan pula, US-EPA membagi istilah akuntansi lingkungan menjadi dua hal utama yaitu bahwa akuntansi lingkungan merupakan sebuah biaya yang mempengaruhi secara langsung bagi perusahaan secara keseluruhan. Kedua, akuntansi lingkungan merupakan biaya individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak berdampak langsung pada perusahaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Sedangkan menurut pendekatan kerangka akuntansi *Triple bottom line accounting*, pelaporan akuntansi meliputi aspek lingkungan, sosial dan keuangan. Konsep ketiga aspek tersebut dapat digambarkan pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Akuntansi dengan Pendekatan *Triple bottom line accounting*

Sumber: *International Guidance Document: Environmental Management Accounting (2005)*

Berdasarkan pendekatan *triple bottom line accounting* tersebut, maka pelaporan akuntansi tidak hanya pada aspek keuangan saja, akan tetapi meliputi aspek non keuangan yaitu aspek sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk menjalankan proses bisnis baik dan aspek lingkungan sebagai pertanggungjawaban potensi timbulnya dampak terhadap lingkungan atas pelaksanaan proses bisnis. Pada perkembangannya, konsep akuntansi lingkungan (*environment accounting*) berkembang menjadi *green accounting*, dalam konsep *green accounting* ini lingkungannya menjadi lebih luas tidak hanya pada aspek penyajian (pertanggungjawaban) dan pengungkapan biaya yang memiliki dampak pada lingkungan, tapi juga meliputi satu siklus akuntansi yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

International Financial Reporting Standard (IFRS) mewajibkan adanya pengungkapan tidak hanya aspek finansial saja tetapi meliputi juga aspek non finansial. Sehingga, selain perusahaan menginformasikan informasinya kepada investor, perusahaan juga dituntut untuk dapat memberikan informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap sumber daya yang ada di perusahaan maupun dari segi lingkungan dan sosial yang melibatkan perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerugian finansial yang berasal dari kegiatan non finansial seperti pencemaran lingkungan, konflik sosial dan sebagainya. Kerugian dari tindakan non finansial. Hal-hal seperti

inilah yang saat ini juga diwajibkan oleh IFRS diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK, 2015) antara lain sebagai berikut :

- a. Identifikasi
- b. Pengakuan
- c. Penyajian
- d. Pengungkapan

Perspektif Islam Tentang Akuntansi Lingkungan

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Apabila masyarakat muslim memahami bahwa interaksi yang benar dengan lingkungan juga merupakan ibadah mungkin kerusakan lingkungan tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, permasalahan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena kejadian alam yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam, kedua adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan yang akhirnya juga mengancam eksistensi manusia. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan

manfaat. laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.⁷

Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar senantiasa menjaga lingkungan sekitarnya, bukan malah merusaknya dengan mencemarinya sehingga akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat merusak alam dan merugikan masyarakat sekitar.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dinyatakan bahwa BUMDes adalah suatu usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 11, cet 1 hlm 77

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri 39/2010). Pembentukan BUMDes telah diatur dengan peraturan perundangan, yaitu UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 87, 88, 89 dan 90. Pasal 87 Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 mengatur hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha; (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. Sementara itu penjelasan pasal 87 ayat UU No. 6/2014 tentang Desa menyebutkan BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Tujuan Pendirian BUM Desa di sini diarahkan sebagai badan di tingkat desa yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUM Desa dapat berkelanjutan.

C. Akuntansi Lingkungan, *Green Accounting* dan BUM Desa

Merujuk pada tujuan pendirian BUMDes yang diarahkan sebagai badan di tingkat desa yang menyediakan jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan warga desa. Badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial. Peningkatan aspek ekonomi melalui unit usaha desa ini secara tidak langsung akan membawa konsekuensi dampak sosial. Pemanfaatan aset untuk disewakan, menjadi obyek wisata, atau pemberdayaan masyarakat untuk membentuk industri-industri rumahan yang dikoordinasikan di tingkat desa akan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Akuntansi lingkungan pada BUMDes akan mengidentifikasi konsep akuntansi secara menyeluruh satu siklus akuntansi, mulai dari proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan terakhir pengungkapan. Akun yang difokuskan adalah baik biaya maupun pendapatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial. Pembahasan akan melihat dari aspek akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen.

Perwujudan dari penerapan akuntansi lingkungan pada akhirnya akan membentuk sebuah konsep *green accounting* yang bersifat holistik dalam satu siklus akuntansi baik aspek finansial maupun non finansial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi saat ini terkait variabel-variabel yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini, kami melakukan observasi pada BUMDes Desa Adijaya, dilanjutkan dengan wawancara mengenai pelaporan keuangan yang dikaitkan dengan lingkungan. Setelah itu, dilanjutkan dengan penggalian data lebih mendalam. penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis akan

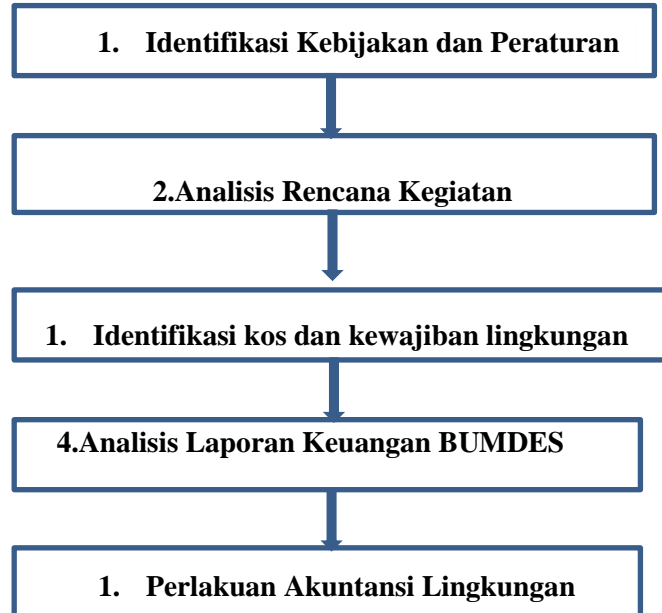
⁸ Susanti. 2014. *Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RK CHaritas Palembang*. Skripsi (Tidak diterbitkan). Palembang: Universitas Truna Merdeka

bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul melalui analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Teknik analisis data ini menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1) Koleksi Data
- 2) Reduksi Data
- 3) Penyajian Data
- 4) Kesimpulan dan saran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan atas penerapan akuntansi lingkungan pada BUMDES Adijaya dilakukan dengan tahapan analisis yang digambarkan pada gambar 2. “Tahapan Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan” yang tersaji sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan

1. Identifikasi Kebijakan dan Peraturan

BUMDES Adijaya adalah salah satu BUMDes yang berada di Kabupaten Lampung Tengah Lampung. Berkaitan dengan kebijakan dan peraturan mengenai lingkungan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2022, bahwa “penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017-2022 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup”. Permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi adalah meningkatnya pertumbuhan produk sampah, baik sampah domestik maupun sampah non domestik. Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara yang telah ditempuh adalah membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah.

BUMDES Adijaya salah satu BUMDes yang menjalankan unit usaha pengolahan sampah yang dimulai Tahun 2017 untuk infrastruktur dan Tahun 2018 untuk operasional aktivitas pengolahan sampah. Aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan sampah rumah tangga, instansi dan industri dengan menerapkan retribusi sebesar Rp20.000,- untuk rumah tangga dan Rp30.000,- untuk instansi dan industri per bulan. Sampah kemudian akan dibawa ke tempat penampungan dengan memilah menjadi sampah organik, plastik dan kaca.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan regulasi yang mengatur mengenai akuntansi keuangan yang terdiri dari pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK)

untuk mengatur lingkup akuntansi keuangan. Berkaitan dengan akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dinyatakan pada PSAK No.1 mengenai penyajian laporan keuangan paragraf 14 bahwa “*Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana factor lingkungan hidup adalah signifikan*”.

2. Analisis Rencana Kegiatan

Berdasarkan dokumen RPJMD, BUMDES Adijaya juga wajib menjalankan upaya pengelolaan lingkungan. Tahun 2017 telah dimulai program pengelolaan lingkungan dengan usulan pembangunan tempat penampungan dan pemilahan sampah. Sosialisasi kepada masyarakat desa telah dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kesadaran lingkungan pada Februari 2018. Upaya yang saat ini sedang dikelola dan direncanakan adalah reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Pada Sampah plastik telah dilakukan pengolahan oleh kelompok pengrajin rumahan menjadi beberapa produk yang bernilai tambah. Sampah organik sedang dalam proses pengolahan menjadi pupuk kompos. Infrastruktur untuk pengolahan kompos ini telah dibangun dengan program hibah. Perencanaan selanjutnya adalah pengolahan terhadap limbah kaca untuk dapat diolah atau didaur ulang kembali untuk dapat bernilai tambah.

3. Identifikasi kos dan kewajiban lingkungan

a. Identifikasi Kos atas Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen catatan keuangan BUMDES Adijaya diperoleh beberapa prasarana yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan dan kos yang melekat pada prasarana

tersebut. Terdapat prasarana yang merupakan bantuan yaitu berupa tempat penampungan dan pemilahan, sedangkan kendaraan pengangkut sampah merupakan pengadaan yang dilakukan oleh BUMDES Adijaya. Adapun rincian sarana dan kos yang melekat pada sarana tersebut tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Sarana Pengolahan Limbah Organik dan Non-organik di
BUMDES Adijaya per September 2020

<i>No</i>	<i>Sarana</i>	<i>Kos/Harga Perolehan</i>	<i>Fungsi</i>
1	Tempat Penampungan dan Pemilahan	Bantuan	Penampungansampah yangtelah direduksi darirumah tangga, instansi dan Industry
2	Kendaraan PengangkutSampah	Rp26.150.000,-	Operasional PengangkutanSampah

Sumber: Data Hasil Wawancara dan telaah dokumen

b. Kewajiban Lingkungan

Kewajiban untuk membayar pengeluaran masa depan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi karena peristiwa, kegiatan atau transaksi masa lalu atau untuk mengkompensasi pihak ketiga yang menderita kerusakan, termasuk tanggung jawab lingkungan kontinjensi yang tergantung pada kejadian atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan yang tidak pasti atau untuk mengkompensasi pihak ketiga yang telah menderita kerusakan tersebut (Sunitha,2015).Atas kewajiban ini, BUMDES Adijaya belum mengalokasikan pengeluaran dengan pertimbangan program pengelolaan lingkungan ini baru dimulai di tahun 2018. Sehingga pengeluaran yang saat ini dilakukan adalah memenuhi sarana dan prasarana dasar.

4. Analisis Laporan Keuangan

Berdasarkan analisa terhadap laporan keuangan BUMDES Adijaya ini, didapati bahwa BUMDES Adijaya membuat beberapa laporan keuangan sesuai dengan jenis usaha yang ada meliputi simpan pinjam, penyewaan mesin molen, usaha fotokopi, pengelolaan sampah dan BUMDes itu sendiri. Berkaitan dengan pengelolaan sampah ini BUMDES Adijaya belum membuat laporan keuangan secara lengkap, seperti laporan neraca, buku besar, jurnal, arus kas, dan laporan terkait lainnya. Namun, BUMDES Adijaya hanya membuat sejumlah laporan keuangan yang sederhana dan ringkas dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang disajikan pada tabel 4.2. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, BUMDES Adijaya baru melakukan transaksi dengan memisahkan catatan untuk unit usaha pengelolaan sampah di Bulan Agustus 2018 dengan memperoleh dukungan kas sebesar Rp3.000.000,- Sedangkan kegiatan sebelumnya berupa sosialisasi edukasi kesadaran lingkungan sebesar Rp 650.000,- menggunakan kas dari BUMDes begitu pula pembelian kendaraan pengangkut sampah sebesar Rp 26.150.000,- menggunakan kas BUMDes. Sehingga pencatatan yang terdapat di unit usaha pengelolaan sampah tidak termasuk pengeluaran tersebut. Sedangkan pemasukan yang saat ini diperoleh adalah bersumber dari retribusi sampah yang dikenakan kepada rumah tangga, instansi dan industri yang bersedia bekerja sama. Besaran retribusi ini Rp20.000,- untuk rumah tangga dan Rp30.000,- untuk instansi dan industri. BUMDES Adijaya melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Meskipun pencatatannya masih sederhana, akan tetapi penyajian terpisah laporan pengelolaan sampah ini telah menunjukkan kepedulian BUMDES Adijaya dalam memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan.

Tabel 4.2
Catatan Kas Unit Pengelolaan Sampah

Tanggal	Keterangan	Kas Masuk	Kas Keluar	Saldo
---------	------------	-----------	------------	-------

1	Agst	Penyertaan kas dari kas BUMDes	3,000,000		3,000,000
1	Agst	Beli bensin viar		40,000	2,960,000
31	Agst	Retribusi Sampah bulan Agustus	510,000		3,470,000
1	Sept	Ganti Laker viar		47,000	3,423,000
1	Sept	Beli Remover kecil		23,000	3,400,000
1	Sept	Beli BBM		50,000	3,350,000
3	Sept	Bayar petugas pengambil sampah bln agts		380,000	2,970,000
25	Sept	beli bbm		35,000	2,935,000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan laporan yang disusun oleh BUMDES Adijaya tersebut, maka format pelaporan akuntansi lingkungan yang digunakan adalah *Outlay Cost Approach*, yaitu pelaporan akuntansi dengan cara mengungkapkan berapa *cost* yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukannya dengan membagi ke dalam kategori tertentu (Parker, Ferris dan Otley (Purwono, 2000)).

5. Perlakuan Akuntansi Lingkungan

a. Akuntansi Lingkungan dilihat dari Segi Pengguna

Akuntansi lingkungan dapat dibedakan dari segi pengguna menjadi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya (Kusumaningtyas, 2013). Pembahasan yang terdapat di BUMDES Adijaya berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut:

1) Akuntansi Keuangan

Akuntansi lingkungan dari konteks akuntansi keuangan merujuk pada sebuah proses pertanggungjawaban kepada pengguna eksternal dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaporan lingkungan. Pelaporan akuntabilitas lingkungan ini menyesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pada BUMDES Adijaya akuntansi lingkungan dari sisi pengguna eksternal terwujud dalam adanya catatan yang khusus digunakan untuk pengelolaan sampah, terpisah dari transaksi BUMDes yang lainnya. Meskipun penyajian pada catatan tersebut masih sederhana berupa kas masuk dan kas keluar, akan tetapi sudah

memenuhi akuntabilitas kepada pengguna eksternal untuk memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sampah.

2) Akuntansi Manajemen

Akuntansi lingkungan dari konteks akuntansi manajemen merujuk pada sebuah proses pengambilan keputusan oleh manajemen atau pihak internal entitas, baik keputusan mengenai pertimbangan investasi, permodalan, evaluasi kinerja maupun pengembangan program yang berkaitan dengan lingkungan. Pada BUMDES Adijaya akuntansi lingkungan dari sisi pengguna internal dalam pengambilan keputusan sudah terlihat dengan akan dikembangkannya pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, pengolahan sampah plastik yang dikelola oleh kelompok wanita tani menjadi produk-produk bernilai tambah, serta ke depannya akan dikembangkan pengolahan limbah kaca untuk dapat bernilai tambah.

3) Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya dalam konteks akuntansi biaya mengacu pada proses penentuan biaya yang akan dipertanggungjawabkan oleh manajemen atas proses bisnis yang dijalankan. Pada BUMDES Adijaya akuntansi lingkungan dari sisi pertanggungjawaban biaya dapat terlihat pada penentuan besaran tarif retribusi dan penentuan biaya yang dikeluarkan dalam program pengelolaan lingkungan ini.

b. Identifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Konsep akuntansi lingkungan sebagai upaya mengungkapkan biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam sebuah entitas pada dasarnya merujuk konsep akuntansi pada umumnya, sesuai dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan, proses pembentukan pos-pos dalam laporan keuangan akan meliputi proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan yang terakhir pengungkapan.

1) Identifikasi

Identifikasi di sini adalah proses identifikasi biaya-biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pada BUMDES Adijaya

identifikasi biaya meliputi biaya pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah, tenaga kerja pengangkut sampah, sedangkan pendapatan diperoleh dari retribusi pengangkutan sampah dari rumah tangga, instansi dan industri. Biaya-biaya yang teridentifikasi sebagai biaya lingkungan pada BUMDES Adijaya teridentifikasi sebesar Rp 978.000.

Sedangkan pendapatan lingkungan yang teridentifikasi sebagai pendapatan lingkungan sebesar Rp 510.000,-

2) Pengakuan

Pengakuan dalam hal ini adalah saat sebuah transaksi memenuhi unsur dan kriteria pengakuan yang akan dinyatakan dalam kata-kata atau jumlah moneter dan mencantulkannya pada laporan keuangan. Pada BUMDES Adijaya biaya-biaya yang terjadi diakui pada saat biaya tersebut terjadi begitu pula terkait pendapatan diakui pada saat kas dari retribusi telah diterima. Sehingga dapat dikatakan BUMDES Adijaya menganut pengakuan *cash basis* atau mengakui biaya dan pendapatan saat kas benar-benar sudah keluar dan masuk.

3) Pengukuran

Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan menyatakan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah moneter ketika unsur-unsur laporan keuangan akan diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. BUMDES Adijaya mengukur dan menilai biaya yang dikeluarkan menggunakan satuan moneter rupiah sesuai dengan jumlah saat transaksi terjadi. Begitu pula dengan pendapatan diukur dan dinilai menggunakan satuan moneter rupiah sesuai dengan jumlah saat transaksi terjadi.

4) Penyajian

BUMDES Adijaya telah menyajikan secara terpisah laporan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Meskipun format laporan masih sederhana berupa kas masuk, kas keluar serta catatan sarana, akan tetapi telah

terinformasi kepada pembaca laporan bahwa terdapat penyajian khusus berkaitan dengan akuntansi lingkungan.

5) Pengungkapan

PSAK 1 penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa pengungkapan dilakukan untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa dan kondisi lain tercermin dalam laporan kinerja keuangan yang dilaporkan. Berkaitan dengan pengungkapan ini, dikarenakan bentuk laporan pengelolaan sampah berupa kas masuk dan kas keluar, maka pada laporan tersebut tidak terlihat pengungkapan yang sesuai PSAK disajikan di catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, BUMDES Adijaya menyusun laporan kinerja tahunan yang memuat informasi- informasi berkaitan dengan kinerja yang telah dilaksanakan. Termasuk dalam laporan kinerja tersebut pengelolaan sampah yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, BUMDES Adijaya memiliki unit usaha pengelolaan sampah yang sedang dalam tahap awal pengembangan. Secara regulasi atau kebijakan, BUMDES Adijaya telah menjalankan yang diamanahkan RPJMD untuk melakukan usaha pengelolaan limbah. Selain itu, sesuai dengan PSAK 1 tentang penyajian pelaporan keuangan, BUMDES Adijaya telah menyusun laporan yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Meskipun pencatatannya masih sederhana, akan tetapi penyajian terpisah laporan pengelolaan sampah ini telah menunjukkan kepedulian BUMDES Adijaya dalam memberikan informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan. BUMDES Adijaya telah memenuhi kaidah identifikasi, pengakuan, pengukuran dan penyajian akuntansi lingkungan. Terkait dengan pengungkapan, belum dilakukan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan, tetapi pada laporan kinerja BUMDes. Secara konsep, akuntansi lingkungan telah menjadi

kepedulian sampai di tingkat pemerintah daerah, yaitu dengan dimasukkannya pada RPJMD. Akan tetapi, secara istilah akuntansi lingkungan belum terlalu dipahami. Optimalisasi penerapan akuntansi lingkungan pada akhirnya tergantung pada kebijakan, sumber daya manusia, dan kesiapan infrastruktur dari entitas yang melaksanakan. Pembahasan yang mendalam di tingkat pembuat kebijakan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan akuntansi lingkungan.

Saran

- a. Diharapkan pihak BUMDES Adijaya menyusun laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengelolaan limbah secara khusus dari laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar BUMDES.
- b. Diharapkan pihak BUMDES Adijaya dapat menyusun laporan biaya lingkungan seperti halnya diklasifikasikan dalam teori Hansen dan Mowen yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal agar dapat mengetahui dari keempat jenis biaya tersebut manakah yang paling banyak mengeluarkan biaya sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh BUMDES.
- c. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan secara menyeluruh pengungkapan perlakuan akuntansi pada biaya pengelolaan limbah dan dapat menemukan standar pengalokasian biaya lingkungan secara khusus sehingga bisa diperbandingkan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan hasil yang didapat dari peneliti secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, Atmadja, Herawati, 2017, “*Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Pada Bumdes Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*”, e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

- Arfan Ikhsan (2008). *Akuntansi Lingkungan & Pengungkapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Haryanto.2003. Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam RSUD Muhammadiyah Jogjakarta. Skripsi (Tidak diterbitkan). Yogyakarta: UMY
- Idris. 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Jurnal Economac*, Vol.2, No.2, Hal: 102-107
- Kusumaningtyas, 2013,“GreenAccounting,MengapaDan Bagaimana?”,Proceeding Seminar Nasional, ISBN: 978-979-636-147-2, Surakarta.
- Margareta, Veny S. 2012. Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Umum Medika Sari. Skripsi (Tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Bina Nusantara
- Pratiwi, Mega Wahyu. 2013. Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Dan Pengungkapan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Mahasiswa Teknologi*. 1- 19.
- Putra C.K, et al. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Malang.
- Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi Lingkungan dan Tripple Bottom Line Accounting: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol.10, No.1, Hal: 105 - 112.
- Suaryana, Agung. 2011. Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol 6 No.1, Hal: 33
- Sukrisno, Agus dan I Cenik Ardana. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanti. 2014. Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RK CHaritas Palembang. Skripsi (Tidak diterbitkan). Palembang: Universitas Truna Merdeka
- Suwardjono. 2009. *Akuntansi Pengantar*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Wijanarko. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan Pada Usaha Krupuk Sukun Di Desa Tegalwajo, Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.2, Hal: 1-2
- W Wibowo. 2018. *Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Desa Membangun IndonesiaKonsepDesaMandiri*.

<https://kerjamembangunesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desamandiri/> diakses pada 10 November 2018